



# Penguatan *Civic Skills* Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Partisipasi Mahasiswa Sebagai Warga Negara

Nurul Febrianti<sup>1</sup>, Syurya Muhammad Nur<sup>2</sup>, Silvia Ratna Juwita<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universita Esa Unggul, [nurul.febrianti@esaunggul.ac.id](mailto:nurul.febrianti@esaunggul.ac.id)

<sup>2</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, [suryamuhamadnur@gmail.com](mailto:suryamuhamadnur@gmail.com)

<sup>3</sup>Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul, [silvia.ratna@esaunggul.ac.id](mailto:silvia.ratna@esaunggul.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 11 Februari 2023

Disetujui: 30 Maret 2023

### Kata Kunci:

*Civic skills*  
*Civic education*  
*Student participation*  
*Citizens*

## ABSTRAK

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penguatan keterampilan kewarganegaraan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan partisipasi siswa sebagai warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian mix method dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penyebaran kuesioner. Partisipan dalam penelitian ini pada data kualitatif adalah dosen dan untuk data kuantitatif adalah 53 orang mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Pembelajaran PKn di sekolah dasar program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Esa Unggul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosen memberikan penguatan keterampilan kewarganegaraan pada mata kuliah Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar melalui model pembelajaran berbasis proyek, kemudian membuka ruang pada setiap pertemuan agar mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran. Hasil analisis data kuantitatif, penguatan keterampilan kewarganegaraan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan partisipasi siswa sebagai warga negara berhasil. Hal ini terlihat dari survei dengan hasil Berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dengan Agree sebanyak 91 poin; Pantau acara dan isu publik dengan Setuju sebanyak 123 poin; Membahas dan mengambil keputusan tentang masalah kebijakan publik dengan Setuju sebanyak 108 poin; Mempengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik dengan Setuju sebanyak 100 poin; Melaksanakan keputusan kebijakan tentang masalah publik dengan Setuju sebanyak 113 poin; Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan sosial dengan Setuju berjumlah 97 poin.

**Abstract:** This study aims to describe how civic skills are strengthened through Citizenship Education in fostering student participation as citizens. This research is a mix method research with data collection by observation, interviews, and documentation, as well as distributing questionnaires. Participants in this study on qualitative data were lecturers and for quantitative data were 53 students who contracted Civics Learning courses in elementary schools in the Elementary School Teacher Education study program at Esa Unggul University. The results of this study indicate that lecturers provide strengthening of civics skills in Civics Learning courses in Elementary Schools through a project-based learning model, then open space at each meeting for students to be active in the learning process. The results of the analysis of quantitative data, strengthening civic skills through Citizenship Education in fostering student participation as citizens is successful. This can be seen from the survey with the results of Interacting with citizens of other countries to promote personal and shared interests with Agree totaling 91 points; Monitor public events and issues with Agree totaling 123 points; Deliberate and make decisions on public policy issues with Agree totaling 108 points; Influencing policy decisions on public issues with Agree totaling 100 points; Carry out policy decisions on public issues with Agree totaling 113 points; Taking action to improve political and social life with Agree totals 97 points.

## A. LATAR BELAKANG

Mahasiswa sebagai warga negara muda dituntut memiliki keterampilan-keterampilan yang akan membantu mereka kelak di masa yang akan datang.

Keterampilan-keterampilan tersebut dapat berupa *hard skill* dan ada yang berupa *soft skill*. *Hard skill* adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan terukur. Biasanya ini didapatkan dalam pendidikan formal, terukur secara kurikuler, dapat dilihat dengan sertifikasi, dan dapat pula

didapatkan lewat pelatihan-pelatihan. Sedangkan soft skill adalah kemampuan interpersonal, lebih menunjukkan bagaimana cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. *Soft skill* dapat dipelajari, namun berbeda dengan *hard skill* yang dapat diukur, *soft skill* lebih sulit untuk diukur, biasanya seseorang memperdalam *soft skill* ini dengan cara terus berlatih.

*Soft skill* yang harus dimiliki mahasiswa beragam, salah satunya ialah partisipasi. Dalam partisipasi terdapat indikator yang dapat terlihat, diantaranya adalah *communicate, negotiate, cooperate, manage conflicts peacefully and fairly, reach consensus*. Keterampilan di atas merupakan keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan dalam setiap proses pembelajaran, perkuliahan, dan kegiatan non-akademik di kampus. Dari kelima keterampilan tersebut, kesemua itu adalah bagian dari *civic skill*. *Civic skill* merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang harus dimiliki warga negara. Dalam kompetensi kewarganegaraan terdapat tiga kompetensi, diantaranya pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) didapatkan melalui salah satunya lewat Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa program studi (prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). PKn dalam prodi PGSD mempelajari konsep dasar PKn dan Pembelajaran PKn di SD. Selain mempelajari kajian-kajian PKn yang akan kelak mahasiswa ajarkan di dalam kelas mereka saat menjadi seorang guru Sekolah Dasar, selain itu juga mempelajari disiplin ilmu PKn yang mendasar, karena kelak mereka juga menjadi warga negara dewasa. Dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan yang juga dipelajari dalam satunya untuk membentuk keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) lewat proses pembelajaran yang diberikan dosen dalam pemberian materi, penggunaan metode pembelajaran, dan proses perkuliahan mata kuliah ini.

*Civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang warga negara setelah seseorang tersebut memiliki pengetahuan tentang sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*). Kirlin berpendapat "*As we will see, the idea of a set of skills, usually called civic skills, which are required to effectively participate in civic and political life, is integral to many concepts of political participation. This literature search is designed to investigate what is known about civic skills empirically and theoretically including how they are defined and measured, and what relationship they have to political participation.*"[1]

Dapat dilihat bahwa *civic skills* diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sipil dan politik, hal ini merupakan bagian integral dari banyak konsep partisipasi politik. Namun, bukan hanya dari segi politik, dalam bidang pendidikan, Kirlin menambahkan bahwa "*civic skills related literature here is dispersed in the civic education and service learning arenas.*"[1] Maka, semakin jelas bahwa lewat Pendidikan Kewarganegaraan dapat menguatkan *civic skills* bagi mahasiswa. Dengan kata lain, dengan menguatnya *civic skills*, tidak sulit bagi mahasiswa untuk menjadi warga negara yang aktif, salah satunya terlihat dari kemampuan mereka dalam berpartisipasi.

Menurut CCE dalam Winaputra [2], terdapat dua kategori dalam *civic skills*, yaitu keterampilan beripikir kritis (*critical thinking skills*) dan keterampilan partisipasi (*participation skills*). Keterampilan berpikir kritis diantaranya adalah mampu mengumpulkan dan menilai sebuah informasi, mengklarifikasi dan memprioritaskan informasi, mengidentifikasi dan menilai sebuah konsekuensi, mampu mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan dalam keterampilan partisipasi mampu berkomunikasi, bernegosiasi, bekerja sama, mengatasi konflik secara damai dan adil, memenuhi suatu kesepakatan.

Keterampilan partisipasi bagi mahasiswa sangat diperlukan, hal ini bukan hanya berkenaan dengan isu politik, namun untuk semua sendi kehidupan mereka kelak. Ketika mahasiswa memiliki keterampilan partisipasi, maka mereka dianggap mampu untuk berkomunikasi, bernegosiasi, bekerja sama, mengatasi konflik secara damai dan adil, memenuhi suatu kesepakatan. Kesemua hal tersebut merupakan *soft skills* yang sangat dibutuhkan ketika mereka masuk ke dunia kerja setelah mereka selesai menempuh perkuliahan di universitas. Dengan memiliki partisipasi, maka mahasiswa akan siap menghadapi dunia kerja ataupun di dalam sosial masyarakat dengan baik.

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang artinya pengambilan bagian, pengikutsertaan. Sedangkan partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Maka dapat diartikan partisipasi sebagai turut serta, berperan serta atau keikutsertaan seseorang di dalam suatu kegiatan maupun agenda. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk ikut serta, berperan serta secara aktif sebagai warga negara. Di dalam proses perkuliahan dan pembelajaran selama di universitas, dapat mengembangkan dan memupuk partisipasi mahasiswa sebagai warga negara muda. Partisipasi dapat dibentuk saat mereka bekerja secara kelompok, masuk dalam kegiatan kemahasiswaan, turut serta saat menjadi sukarelawan, dan masih banyak lagi. Peran Pendidikan Kewarganegaraan juga turut serta dalam pembentukan partisipasi dalam diri mahasiswa.

Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat universitas bukan hanya ditekankan pada materi semata, namun lebih jauh lagi, mahasiswa dituntut memiliki keterampilan dan watak kewarganegaraan. Sehingga dengan bekal tersebut, akan memudahkan mereka kelak saat bekecimpung di dunia kerja maupun di dalam sosial masyarakat. Oleh karena itu, dosen dalam hal ini sebagai tenaga pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di universitas, harus berinovasi dalam menyampaikan materi serta mengintegrasikan nilai-nilai partisipasi untuk menguatkan *civic skills* pada mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud menggambarkan bagaimana penguatan *civic skills* melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara serta menilai sikap dan perilaku mahasiswa yang berkaitan dengan partisipasi. Hal ini bermanfaat untuk memperdalam disiplin ilmu kewarganegaraan dan fokus terhadap *civic skills* mahasiswa yang dapat menumbuhkan partisipasi mereka sebagai warga negara muda.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian *mixed method*. Menurut Creswell *mixed method research design* adalah pengumpulan, analisis, dan pencampuran metode kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah penelitian atau rangkaian penelitian untuk memahami pertanyaan penelitian [3]. Data kualitatif diambil berdasarkan wawancara kepada dosen mata kuliah Pembelajaran PKn di SD, lalu observasi saat proses pembelajaran, dan studi dokumentasi.

Penelitian kualitatif dengan wawancara dosen secara mendalam yang berkaitan dengan penguatan *civic skill* melalui pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa. Selanjutnya peneliti juga mengamati proses pembelajaran dengan cara observasi di dalam kelas, serta studi dokumentasi dengan melihat RPS dan materi ajar yang digunakan oleh dosen. Teknik analisis data menggunakan teknik dari Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman [4] analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus secara tuntas hingga memperoleh data. Kegiatan analisis data kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Triangulasi sumber menjadi uji kredibilitas yang dilakukan pada penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data yang telah didapatkan.

Sedangkan data kuantitatif diambil dari penyebaran angket kepada mahasiswa di dalam kelas tersebut dengan menggunakan populasi dan sampel yang sama yaitu berjumlah 53 mahasiswa. Menentukan sampel berdasarkan jumlah populasi berdasarkan teknik pengambilan sampel total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi [5]. Alasan mengambil

total sampling karena menurut Sugiyono jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian[5]. Penelitian kuantitatif pada penelitian ini dengan menggunakan metode survei, menyebarkan angket kuisioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang ditujukan untuk mahasiswa di kelas tersebut setelah mendapat mata kuliah Pembelajaran PKn di SD. Dengan menggunakan skala Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-ragu (R), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) untuk mengukur sikap dan perilaku mahasiswa berkaitan dengan *civic skills* dan partisipasi mereka. Selanjutnya dianalisis dengan perhitungan secara manual dan Microsoft Exel untuk menghitung poin-poin tiap pernyataan yang telah dipilih oleh responden. Pernyataan berjumlah 30 dengan indikator sikap dan perilaku sebagai berikut; Berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan bersama; Memantau peristiwa dan masalah publik; Berunding dan membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik; Memengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik; Melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu publik; Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan kemasyarakatan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penguatan Civic Skills melalui Pembelajaran PKn

Hasil temuan pada penguatan *civic skills* melalui pembelajaran PKn akan dibahas menjadi tiga temuan dan pembahasan, yakni proses perkuliahan secara *hybrid*, model pembelajaran berbasis proyek, dan membangun ruang kelas yang partisipatif. Hasil temuan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AR yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran PKn SD, observasi yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, dan analisis dokumen seperti RPS atau materi ajar yang digunakan.

#### a) Perkuliahan secara *Hybrid*

Pelaksanaan perkuliahan di Universitas Esa Unggul pada masa endemi Covid-19 dilakukan secara *hybrid*. Universitas Esa Unggul memiliki tiga kampus yang terdapat di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Maka pembelajaran *hybrid* dilakukan secara paralel kepada ketiga kampus tersebut. Dosen mengajar di kampus Jakarta secara langsung kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Jakarta, sementara untuk di kampus Bekasi dan Tangerang tersambung secara *online* dan *live* dengan perangkat yang dimiliki oleh Universitas. Menurut Karabulutlgu & Jahren dalam Riyanda [6] pembelajaran *hybrid* menggabungkan kelas virtual dengan kelas konvensional yang di dalamnya terdapat desain pembelajaran yang layak untuk dimanfaatkan sebagai fitur sistem pembelajaran yang akan diselesaikan peserta didik itu sendiri. Model hybrid learning merujuk

pada pencampuran dan penggabungan antara beberapa lingkungan pembelajaran yaitu tatap muka dalam kelas dan secara dalam jaringan atau *online* [7].

Tidak terkecuali pada program studi (prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Prodi PGSD juga mengimplementasikan pembelajaran *hybrid* saat endemi Covid-19. Alasan protokol kesehatan menjadi hal yang harus dipertimbangkan, maka persebaran jadwal mata kuliah harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus. Mata kuliah Pembelajaran PKn SD menerapkan sistem pembelajaran *hybrid* dimana dosen dan mahasiswa PGSD di kampus Jakarta berada dalam satu ruangan, sementara mahasiswa di kampus Tangerang dan Bekasi berada di rumah masing-masing lewat aplikasi *zoom*. Berikut pernyataan dosen mata kuliah Pembelajaran PKn SD yaitu Pak AR yang menekankan bahwa: “perkuliahan semester ganjil saat ini dilakukan secara *hybrid* mengingat kita masih peralihan yang tadinya *full online* ke *hybrid learning*. Saya tetap datang memberikan perkuliahan di kampus Kebon Jeruk, tapi di dalam kelas saya membuka *zoom* untuk memberikan perkuliahan untuk mahasiswa yang ada di Tangerang dan Bekasi”. Selanjutnya Pak AR menekankan bahwa *hybrid learning* memiliki tantangan sendiri karena mahasiswa yang tidak berada di tempat yang sama, terkadang tidak berani bertanya atau kurang aktif, dan Ia merasa harus fokus pada yang di depan mata dan di depan layar (*zoom*). Hal demikian senada dengan hasil penelitian Hidayatullah dan Anwar [8] yang menyatakan bahwa mempertahankan tanggung jawab pribadi untuk belajar mandiri bisa jadi sulit bagi sebagian siswa, yang mungkin disebabkan oleh disiplin individu. Komunikasi dan diskusi antara guru dan siswa tentunya kurang responsif, meskipun ruang dan waktu tidak menghalangi hal tersebut karena tidak adanya interaksi tatap muka secara langsung.

### b) Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Selain penyampaian materi dan *transfer of knowledge* yang dilakukan oleh Pak AR mengenai *civic skills* dan partisipasi, beliau juga menggunakan model pembelajaran berbasis proyek untuk menjadi tugas besar pada mata kuliah ini. Pak AR mengungkapkan bahwa beliau memberikan tugas besar untuk dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok yang berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau yang lebih disingkat PjBL adalah model pembelajaran dimana peserta didik diminta untuk menghasilkan sebuah proyek yang menuntut kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Alasan Pak AR menggunakan model ini ada kaitannya dengan *civic skills*, Ia mengatakan: “PjBL membantu mahasiswa membentuk keterampilan-keterampilan yang nantinya akan mereka gunakan, seperti kolaborasi atau kerjasama, memiliki keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Karena dalam proses melakukan proyek tersebut, mereka dipaksa untuk

hal tersebut”. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saenab[9] menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan kolaborasi mahasiswa saat dibelajarkan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek.

Pada prosesnya berdasarkan observasi di dalam kelas, Pak AR membentuk kelompok berdasarkan lokasi mahasiswa pada kelas tersebut. Hal ini dilakukan agar memudahkan mereka untuk bekerja secara kelompok, maka dibagi berdasarkan lokasi kampus di Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Setelah membentuk kelompok-kelompok, selanjutnya Pak AR memberikan pengertian tentang PjBL tersebut serta menentukan topik yang akan dipilih oleh tiap-tiap kelompok. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada mata kuliah Pembelajaran PKn SD terlihat materi seperti Hakikat, Fungsi, dan Tujuan PKn; PKn sebagai Pendidikan Nilai Moral, Konsep HAM, Konsep Penegakan Hukum, Konsep Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, Pembelajaran Tematik dan Portofolio di SD. Selanjutnya Pak AR meminta untuk mahasiswa mengangkat topik proyek berdasarkan materi-materi yang terdapat dalam RPS.

Penggunaan PjBL menurut Pak AR dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dan mengasah keterampilan mereka sebagai warga negara. Hal ini terbukti pada proses pelaksanaan proyek, mahasiswa aktif di dalam kelas membahas persoalan yang mereka angkat di tiap kelompok. PjBL sudah terbukti berhasil membuat mahasiswa menjadi partisipatif, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Nurkolis [10] dengan hasil terdapat peningkatan partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan melalui pembelajaran berbasis proyek.

### c) Membangun Ruang Kelas yang Partisipatif

Pengintegrasian nilai-nilai partisipatif dilakukan saat proses perkuliahan berlangsung dan saat proyek yang mereka lakukan sedang berjalan. Keterampilan partisipasi ialah mampu berkomunikasi, bernegosiasi, bekerja sama, mengatasi konflik secara damai dan adil, memenuhi suatu kesepakatan. Pak AR menyatakan bahwa Ia selalu mencoba memantik diskusi pada setiap sesi perkuliahan, hal ini untuk merangsang mahasiswa dapat berani bicara depan kelas dan mengutarakan pendapat mereka. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa mahasiswa yang selalu aktif, namun ada pula yang terlihat pasif hanya memperhatikan tanpa mengeluarkan pendapat ataupun bertanya. Menurut Zamroni [11] Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang mengembangkan budaya demokrasi mahasiswa, keterampilan komunikasi seperti dialog, persuasi, keterampilan negosiasi dan kemampuan mengambil keputusan yang rasional untuk membangkitkan aspirasi anggota masyarakat dan mengubah aspirasi tersebut menjadi dukungan atau permintaan. menargetkan sistem dan proses politik.

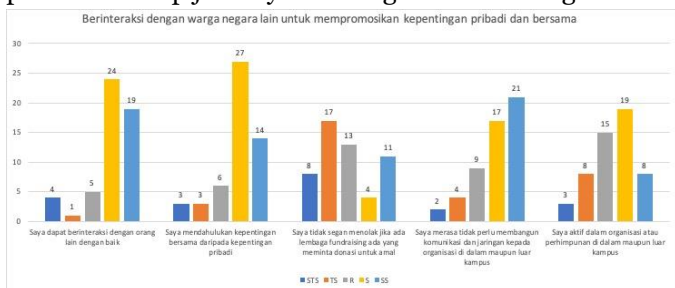
Oleh karena itu, PKn merupakan salah satu wahana bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan partisipatif. Proses pembelajaran di dalam kelas bukan hanya sekadar *transfer of knowledge*, melainkan lebih dari itu, pada setiap pertemuan haruslah bermakna dalam proses pengembangan keterampilan sebagai warga negara. Warga negara yang partisipatif dapat dikategorikan sebagai warga negara efektif, seperti yang dikemukakan oleh Martorella[12] bahwa warga negara yang baik sebagai tujuan dari PKn adalah warganegara yang efektif (*effective citizen*), yaitu warga negara bersifat reflektif, cakap, dan memiliki kepedulian [13].

**2. Mempelajari Civic Skills Menumbuhkan Partisipasi Mahasiswa**

Partisipasi mahasiswa tidak dapat dibentuk hanya dengan memberikan materi atau *knowledge* saja, melainkan harus dilatih dan dibiasakan saat proses pembelajaran berlangsung. Setelah mengetahui proses penguatan civic skills melalui PKn dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara, selanjutnya kita akan melihat sikap dan perilaku dari mahasiswa. Terdapat indikator yang dapat dilihat setelah mempelajari *civic skills* dan akhirnya dapat menumbuhkan partisipasi mahasiswa. Beberapa kompetensi dari keterampilan partisipasi yang merupakan bagian dari *civic skill* dalam *civic competence*, yaitu berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan bersama, memantau peristiwa dan masalah publik, berunding dan membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik, mempengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik, melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu publik, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan kemasyarakatan [14];[1].

**a) Berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan bersama**

Indikator pertama dari sikap partisipasi mahasiswa berkaitan dengan inreraksi mereka sebagai warga negara dengan wargan negara lain yang mana turut serta pada kepentingan pribadi dan bersama. Mahasiswa sebagai agen perubahan merupakan warga negara yang memiliki peran terhadap jalannya berbangsa dan bernegara.

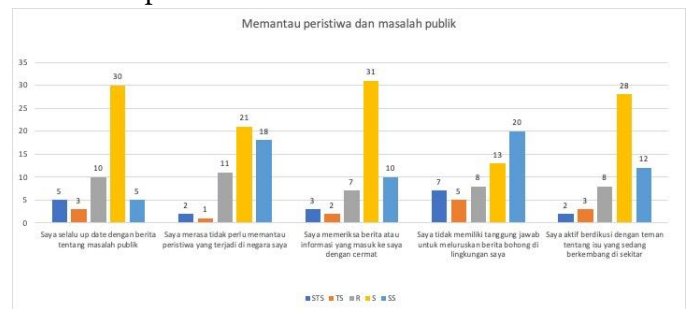


**Gambar 1.** Berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepetingan pribadi dan bersama

Pada gambar di atas mahasiswa Setuju sikap mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi mendapatkan poin tertinggi yaitu 27. Mereka juga memiliki sikap Sangat Setuju untuk membangun komunikasi dan jaringan organisasi di dalam maupun luar kampus dengan poin 21. Berdasarkan diagram chart di atas, maka berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan bersama sudah baik pada mahasiswa PGSD Universitas Esa Unggul yang mengontrak mata kuliah Pembelajaran PKn SD. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Whitacre[15] bahwa *civic skills* memberikan pondasi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Pembelajaran PKn memberikan keterampilan mahasiswa untuk mengutamakan kepentingan publik.

**b) Memantau peristiwa dan masalah publik**

Indikator kedua yaitu ingin melihat apakah mahasiswa memantau peristiwa dan masalah publik sebagai bagian dari warga negara di suatu negara. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil survei di bawah ini.

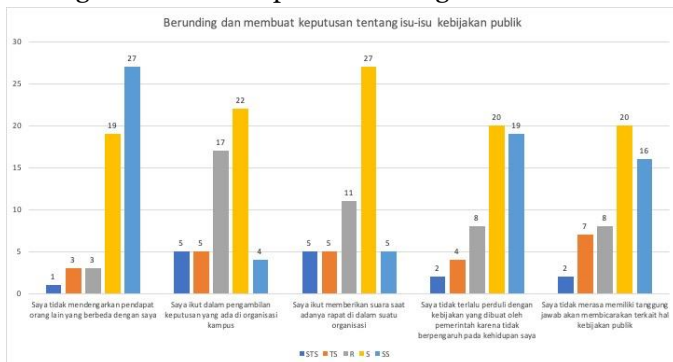


**Gambar 2.** Memantau peristiwa dan masalah publik

Pada gambar di atas poin tertinggi ada di angka 31 dengan pernyataan bahwa mereka memeriksa berita atau informasi yang masuk dengan cermat. Berkembangkan teknologi dan informasi yang begitu cepat, berita bohong atau adu domba sangat mudah tersebar. Keterampilan warga negara yang dapat menyaring berita secara baik, merupakan keterampilan yang perlu menjadi perhatian. Hal ini ada kaitannya dengan *civic literacy* (kemelekan warga negara) yang mana *civic literacy* diartikan pengetahuan dan keterampilan warga negara untuk menghadapi masalah sosial, politik, dan pemerintahan di mana warga negara dituntut untuk bertindak secara mandiri. Hasil penelitian Zuria dan Suyanto [16] menunjukkan bahwa mahasiswa mampu megenali berita *hoax* di media sosial. Dari hasil penelitian, rata-rata skor jawaban dari setiap indikator menyatakan bahwa mahasiswa Unesa telah mampu memiliki kecakapan-kecakapan yang terdapat dalam keterampilan Intelektual. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran PKn dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menganalisis berita dan informasi yang valid atau tidak valid.

**c) Berunding dan membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik**

Pada indikator ketiga apakah mahasiswa dapat berunding dan membuat keputusan tentang isu-isu publik. Dari data penelitian di bawah ini, terlihat bahwa mahasiswa sangat tidak setuju bila mereka tidak mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat mereka sendiri dengan poin 27. Kemampuan mendengarkan juga merupakan keterampilan sebagai warga negara, Johnson berpendapat bahwa peserta didik dengan keterampilan mendengarkan yang lebih baik membantu mengembangkan siswa dengan keterampilan yang kurang berkembang [17]. Maka kita dapat memahami, keterampilan mendengarkan dapat menstimulasi bagi rekan sejawat mereka yang masih kurang dalam keterampilan mendengarkan.

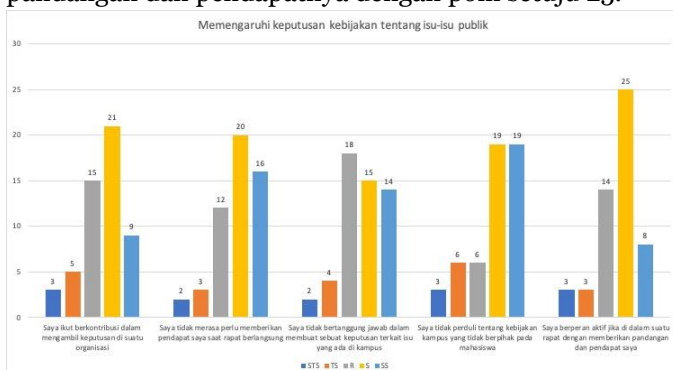


**Gambar 3.** Berunding dan membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik

Pada poin yang sama di angka 27, mereka setuju turut memberikan suara saat mengikuti rapat di dalam organisasi. Penelitiannya mengungkapkan model Problem Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat membantu mengatasi dalam pembelajaran terutama dalam minat dan motivasi belajar peserta didik dan dapat melatih keterampilan berbicara peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) [18].

**d) Memengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik**

Pada indikator memengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik, pada pernyataan mahasiswa berperan aktif di dalam suatu rapat dengan memberikan pandangan dan pendapatnya dengan poin setuju 25.

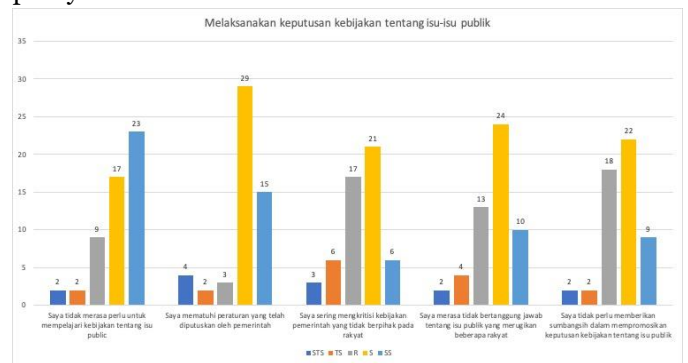


**Gambar 4.** Memengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik

Berperan aktif dalam rapat maupun ruang kelas menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat partisipatif yang tinggi. Mereka merasa turut bertanggung jawab akan proyek yang sedang mereka kerjakan atau tanggung jawab mereka sebagai pengurus suatu organisasi. Hal demikian sejalan dengan temuan Verba [1], yang menemukan bahwa *civic skills* lebih signifikan dalam memprediksi partisipasi politik daripada tingkat pekerjaan, afiliasi organisasi, kehadiran keagamaan, dan waktu luang. Oleh karena itu, keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) bukan hanya dibentuk dari dalam proses perkuliahan, melainkan juga di dapat dari organisasi kampus, organisasi keagamaan, keluarga di dalam rumah, dan dunia kerja.

**e) Melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu publik**

Melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu publik menjadi indikator kelima dalam kuisioner pernyataan.



**Gambar 5.** Melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu publik

Setuju tertinggi yaitu poin 29 dengan pernyataan mereka mematuhi peraturan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Salah satu karakteristik *a good and smart citizens* ialah mematuhi peraturan dan tunduk pada hukum yang berlaku. Branson mengidentifikasi karakteristik warga negara di lingkungan publik dan privat, salah satunya adalah berpartisipasi dalam urusan sipil secara efektif dan bijaksana dimana menghormati hukum, yang meliputi sifat ini, antara lain: (1) bersedia menaati hukum, meskipun tidak menyetujuinya; (2) bersedia bertindak secara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak bijaksana dan adil [19].

**f) Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan masyarakat**

Indikator terakhir ialah mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan masyarakat. Hasil survei pada indikator ini sangat menarik, dimana sikap ragu-ragu memperoleh poin tertinggi yaitu 26 pada pernyataan mahasiswa tidak tertarik akan politik praktis di Indonesia. Kekecewaan atau tidak percaya pada partai politik atau pejabat negara menjadi alasan utama warga negara muda enggan masuk dalam politik praktis. Hasil

survei yang dilakukan Centre for strategic and International Studies (CSIS) dalam Yuliono[20] menyatakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangat rendah, hanya 22,4 persen responden menilai partai politik memiliki kinerja yang baik, sisanya menilai sebaliknya.



**Gambar 6.** Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan kemasyarakatan

Namun, hasil survei pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa mempunyai sikap sebanyak 26 poin sangat setuju tidak akan melewatkan pemilu untuk memberikan suara (*vote*) mereka. Di sisi lain mereka ragu untuk terjun langsung pada politik praktik, namun sisi lainnya mereka sangat positif untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Hasil dari penelitian Yahzinka [21] menunjukkan bahwa pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebagai pendidikan politik yang dimana segala landasan atau teori berpolitik terdapat didalam pendidikan kewarganegaraan. Keduanya bersinambungan dan berhubungan erat, bahkan dibahas segala tata cara atau norma berpolitik juga terdapat dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa dapat tumbuh keterampilan partisipasinya yang mana itu merupakan bagian dari *civic skills*.

Berdasarkan data penelitian di atas terkait indikator-indikator berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan bersama, memantau peristiwa dan masalah publik, berunding dan membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik, mempengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik, melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu publik, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan kemasyarakatan, maka dapat dilihat data seperti di bawah ini.



**Gambar 7.** Sikap Setuju Mahasiswa

Alasan data penelitian ini fokus terhadap sikap setuju karena dari keenam indikator yang menjadi dasar dalam menilai sikap mahasiswa terkait penguatan *civic skills* dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa menjadi skala paling sering muncul. Berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan bersama dengan Setuju berjumlah 91 poin; Memantau peristiwa dan masalah publik dengan Setuju berjumlah 123 poin; Berunding dan membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik dengan Setuju berjumlah 108 poin; Memengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik dengan Setuju berjumlah 100 poin; Melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu publik dengan Setuju berjumlah 113 poin; Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan kemasyarakatan dengan Setuju berjumlah 97 poin.

#### D. SIMPULAN

Dari hasil temuan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan *civic skills* melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara dilakukan oleh dosen mata kuliah Pembelajaran PKn SD dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dan membangun ruang kelas yang partisipatif. Model PjBL menunjukkan dapat menguatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan menumbuhkan partisipasi mahasiswa. Dosen menstimulus mahasiswa untuk partisipatif di ruang kelas dengan memantik diskusi serta membahas PjBL atau proyek yang sedang mahasiswa kerjakan.

Selanjutnya, hasil temuan dari penyebaran kuisioner terhadap 53 mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Pembelajaran PKn SD menunjukkan bahwa Berinteraksi dengan warga negara lain untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan bersama dengan Setuju berjumlah 91 poin; Memantau peristiwa dan masalah publik dengan Setuju berjumlah 123 poin; Berunding dan membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik dengan Setuju berjumlah 108 poin; Memengaruhi keputusan kebijakan tentang isu-isu publik dengan Setuju berjumlah 100 poin; Melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu publik dengan Setuju berjumlah 113 poin; Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan kemasyarakatan dengan Setuju berjumlah 97 poin.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan *civic skills* melalui pembelajaran PKn berhasil dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara pada mahasiswa PGSD Universitas Esa Unggul.

#### DAFTAR RUJUKAN

[1] M. Kirlin, "The Role of Civic Skills in Fostering Civic Engagement. CIRCLE

- Working Paper 06.,” *Cent. Inf. Res. Civ. Learn. Engagem.*, 2003.
- [2] U. S. Winataputra, “Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan,” *Tangerang Selatan Univ. Terbuka*, 2015.
- [3] J. Creswell, “Riset pendidikan: Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi riset kualitatif & kuantitatif,” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2015.
- [4] A. M. Miles & Huberman and J. Saldana, “Qualitative data analysis,” *Transl. by Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, A Methods Sourcebook*, 2014.
- [5] Sugiyono, “Metode penelitian kombinasi (mixed methods),” *Bandung Alf.*, 2015.
- [6] A. R. Riyanda, T. Agnesa, A. Wira, A. Ambiyar, S. Umar, and U. Hakim, “Hybrid learning: alternatif model pembelajaran di masa pandemi covid-19,” *J. Basicedu*, vol. 6, no. 3, pp. 4461–4469, 2022.
- [7] A. Doering, “Adventure learning: Transformative hybrid online education,” *Distance Educ.*, vol. 27, no. 2, pp. 197–215, 2006.
- [8] F. Hidayatullah and K. Anwar, “Hybrid learning dalam pembelajaran pendidikan jasmani sekolah dasar dan menengah maupun pendidikan olahraga perguruan tinggi,” in *Prosiding SENOPATI (Seminar Olahraga Dalam Pendidikan Teknologi dan Inovasi)*, 2020, pp. 10–16.
- [9] S. Saenab, S. R. Yunus, and H. Husain, “Pengaruh penggunaan Model Project Based Learning terhadap keterampilan kolaborasi mahasiswa pendidikan IPA,” *BIOSEL (Biology Sci. Educ. J. Penelit. Sci. dan Pendidik.*, vol. 8, no. 1, pp. 29–41, 2019.
- [10] N. Nurkolis, S. Sumarmi, and I. K. Astina, “Partisipasi Mahasiswa Geografi Terhadap Pelestarian Lingkungan Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Dalam Kajian Kota Hijau (Green Cities),” *J. Pendidik. Teor. Penelitian, dan Pengemb.*, vol. 2, no. 11, pp. 1515–1519, 2017.
- [11] Zamroni, “Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi,” *Jakarta PSAP Muhammadiyah*, 2007.
- [12] A. M. Marterolla and A. M. Portugies, “Prevention of Sexual Abuse on Learning Disabled Children,” in *10th International Congress on Child Abuse and Neglect, Kuala Lumpur, Malasia*, 1994.
- [13] M. Murdiono, “Peningkatan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah,” *J. Penelit. Ilmu Pendidik.*, vol. 3, no. 1, 2010.
- [14] J. J. Patrick, “Teaching Democracy. ERIC Digest,” 2003.
- [15] E. Whitacre, “Civic Skills,” *Learningtolive.com*, 2004, [Online]. Available: <https://www.learningtogive.org/resources/civic-skills>
- [16] S. F. Zuria, “Kajian keterampilan intelektual mahasiswa UNESA dalam mengenali berita hoax di media sosial,” *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 2, 2018.
- [17] E. Johnson, “Developing listening skills through peer interaction,” *Music Educ. J.*, vol. 98, no. 2, pp. 49–54, 2011.
- [18] C. Cahyono, D. Mulyana, L. Sukarlina, and D. Puspitasari, “Analisis implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam menumbuhkan keterampilan mengemukakan pendapat pada proses pembelajaran,” *J. Ilm. Mimb. Demokr.*, vol. 21, no. 2, pp. 87–92, 2022.
- [19] M. S. Branson, “The role of civic education: A forthcoming Education Policy Task Force position paper from the Communitarian Network,” *Cent. Civ. Educ.*, 1998.
- [20] A. Yuliono, “Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya),” *J. Adm. Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 173–184, 2013.
- [21] E. M. Yahzinka, “Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik,” *J. Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 2, pp. 87–91, 2019.